BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah membutuhkan anggaran sebagai fondasi utama dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Ketersediaan anggaran yang memadai merupakan salah satu aspek esensial untuk memastikan kelancaran dan efektivitas implementasi program tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi alat strategis untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program pemerintahan. Pendapatan negara juga menjadi elemen penting dalam merealisasikan pelaksanaan APBN (Natia, 2024).

Penerimaan negara di Indonesia berasal dari berbagai sektor, yang seluruh hasilnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan serta melaksanakan pembangunan nasional secara adil dan berkelanjutan (Prasetyo, 2024). Dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional tersebut, terdapat dua sumber penerimaan utama, yaitu Penerimaan dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Mahadewi & Ariana, 2023).

UU No. 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak "Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan" (Adhitama & Joshua, 2023). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memegang peranan penting dalam mendukung berbagai program pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan negara selain pajak. Secara khusus, PNBP digunakan untuk membiayai program-program nasional yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Ummah, 2019).

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor publik adalah langkah strategis yang berperan signifikan dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia (Syamsir, 2024). Langkah ini bertujuan untuk membentuk aparatur yang profesional, memiliki integritas tinggi, dan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan perubahan di lingkungan pemerintahan yang dinamis. Salah satu pendekatan utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan, khususnya yang ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Program ini dirancang untuk membekali ASN dengan kemampuan yang adaptif, inovatif dan responsif terhadap tantangan era globalisasi serta dinamika pelayanan publik. Keberhasilan pelaksanaan pelatihan ini sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai yang berasal dari penerimaan negara. Dengan pengelolaan PNBP yang efektif, program pelatihan tidak hanya dapat berjalan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, tetapi juga dapat diadaptasi untuk menjawab kebutuhan dinamis di era globalisasi dengan memanfaatkan teknologi digital dan memahami dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks. Hal ini menjadikan PNBP sebagai instrumen keuangan yang vital dalam mendorong keberhadilan reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing ASN di tingkat nasional maupun global.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, metode pembelajaran dalam pelatihanini terus berkembang. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah metode *blended learning*, yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring (*online*). Metode ini tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam proses mengajar, tetapi juga memungkinkan peserta untuk mengakses materi secara lebih mandiri dan interaktif.

Selain itu, metode ini juga efisien dalam hal waktu dan biaya karena mengurangi kebutuhan perjalanan fisik yang biasanya diperlukan dalam pelatihan konvensional. *Blended learning* juga menciptakan pembelejaran

yang lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi seperti video, simulasi, kuis daring, dan forum diskusi yang membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Lebih lanjut, metode ini mendorong kemandirian peserta dalam mengatur waktu belajar dan mendalami materi secara mandiri, sekaligus memberikan akeses ke sumber belajar yang beragam, seperti *e-book*, video tutorial dan artikel (Ismaniati, Sungkono, 2016).

Salah satu lembaga kementerian yang mengatur dan mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jatinangor (Puslatbang PKASN LAN RI Jatinangor). PNBP yang ada pada Puslatbang PKASN LAN adalah untuk menunjang segala kebutuhan atau penyelenggaraan kegiatan pelatihan ataupun pemetaan kompetensi ASN yang dilakukan.

Perlan Nomor 08 Tahun 2020 BAB XII bagian kedua pasal 101 menyatakan: "Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan ASN, serta pengkajian di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas ASN" (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara, 2020).

Puslatbang PKASN LAN Jatinangor sebagai lembaga penyelenggara pelatihan bagi ASN menawarkan berbagai pelatihan yang dilaksanakan. Salah satunya adalah Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pengawas dalam memimpin dan mengelola tugas-tugas organisasi secara efektif. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para pengawas dengan keterampilan teknis, kemampuan strategis, serta pemahaman mendalam mengenai manajemen sumber daya, pengambilan keputusan, dan pemberian arahan kepada tim kerja (Karimi et al., 2023).

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dirancang sebagai alat penting untuk menghasilkan pemimpin yang tidak hanya terampil secara teknis tetapi juga memiliki kemampuan strategis dalam melaksanakan tugas-tugas manajerial. Melalui program ini, pengawas diharapkan dapat mengelola sumber daya dengan efisien, membuat keputusan yang tepat, serta memberikan arahan yang jelas kepada tim mereka. Selain itu, PKP juga menitikberatkan pada pengembangan kemampuan dalam memimpin perubahan, termasuk kemampuan mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi inovatif, dan menerapkan perubahan secara berkelanjutan di tempat kerja.

Salah satu penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengwas yang telah diselenggarakan di Puslatbang PKASN LAN adalah Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angakatan I pada tanggal 25 April – 18 Juli 2024. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta dari Pemerintah Kota Bandung. Dengan rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan didasarkan pada PP Nomor 60 Tahun 2021, mneyebutkan bahwa biaya peserta pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (*Blended Learning*) di Puslatbang PKASN LAN Jatinangor sebersar Rp. 14.643.000 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Selanjutnya, Puslatbang PKASN LAN Jatinangor telah menerapkan prinsip administrasi publik salah satuna berupa keterbukaan informasi. Dapat dilihat dari dipublikasikannya dokumen Laporan Anggaran Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya, sampai juga pada kegiatan-kegiatan pelatihan yang diselenggarakannya. Hal ini terlihat dari situs resmi Puslatbang juga dengan akun media sosial instagram Puslatbang.

Demikian pula pada salah satu pelatihan yang kali ini menjadi topik penelitian dalam skripsi ini adalah Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I yang diselenggarakan pada tahun 2024. Di laman instagram Pulsatbang tersedia nilai rata-rata dari hasil kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I tahun 2024 dengan nilai rata-rata sebesar 92,38. Berbeda dengan hasil rata-rata dari kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Angkatan I di tahun 2023, dibandingkan dengan yang diselenggarakan pada tahun 2024 terlihat terdapat angka penuruan. Pada tahun 2023 nilai rata-rata sebesar 93.95, sedangkan pada tahun 2024 senilai 92,38.

Gambar 1.1
Nilai Rata-rata PKP I 2024

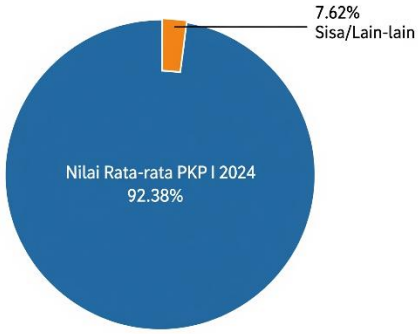

Sumber:Diolah Peneliti (2025)

Gambar 1.2
Nilai Rata-rata PKP I 2023

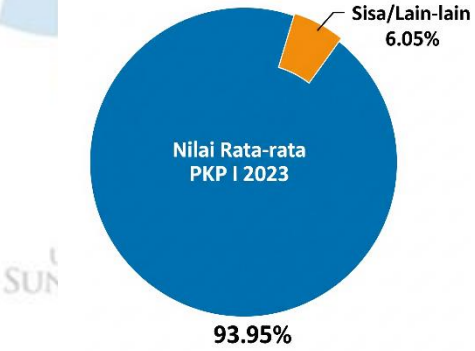

Sumber:Diolah Peneliti (2025)

Keterangan:

: Nilai Rata-rata PKP

: Lain-lain

Dalam hal penuruan ini, dapat disebabkan dari berbagai faktor. Salah satunya dari penggunaan anggaran PNBP pada setiap kegiatannya. Pada

kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I tahun 2024 penggunaan anggaran PNBP adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1

Rincian Anggaran Biaya PKP 1 2024

Jenis	Pagu Awal	Realisasi
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.500.000	11.000
Belanja Bahan	158.010.000	158.687.210
Belanja Honor Output Kegiatan	123.200.000	55.700.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	174.677.000	136.179.500
Belanja Sewa		195.000
Belanja Jasa Profesi	29.000.000	19.900.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.475.000	38.773.400
	497.862.000	409.446.110

Sumber: RAB PKP Angkatan I Puslatbang PKASN LAN (2024)

Dilihat dari tabel diatas yang merupakan rincian anggaran dan rincan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Pelatihan ini terdapat ketidakserasian dalam jumlah besar nya. Maka dapat dikatakan juga bahwa dengan berkurangnya nilai rata-rata pada kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan I pada tahun 2024 dengan 2023 mengalami penurunan, dapat disebabkan juga dari penggunaan anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pelatihan pada tahun 2024 ini.

Maka selanjutnya peneliti melakukan penelitian dengan topik tersebut yang berfokus pada penggunaan anggaran PNBP dalam terlaksananya kegaitan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan I tahun 2024 ini. Penelitian ini berjudul "**Efektivitas *Value For Money* Dalam Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I (*Blended Learning*) Tahun 2024 Di Puslatbang PKASN LAN Jatinangor**".

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti memberikan batasan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Seberapa besar kontribusi yang diberikan *Value For Money* terhadap pelaksanaan pelatihan di Puslatbang PKASN LAN secara parsial?
2. Seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi ekonomi terhadap pelaksanaan pelatihan di Puslatbang PKASN LAN secara parsial?
3. Seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi efisiensi terhadap pelaksanaan pelatihan di Puslatbang PKSAN LAN secara parsial?
4. Seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi efektivitas terhadap pelaksanaan pelatihan di Puslatbang PKSAN LAN secara parsial?
5. Seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi keadilan terhadap pelaksanaan pelatihan di Puslatbang PKSAN LAN secara parsial?
6. Seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi kesetaraan terhadap pelaksanaan pelatihan di Puslatbang PKSAN LAN secara parsial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah untuk:

1. Mengidentifikasi seberapa besar kontribusi yang diberikan *Value For Money* terhadap pelaksanaan pelatihan di Puslatbang PKASN LAN secara parsial.
2. Mengindentifikasi seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi ekonomi terhadap pelaksanaan pelatihan di Puslatbang PKASN LAN secara parsial.
3. Mengindentifikasi seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi efisiensi terhadap pelaksanaan pelatihan di Puslatbang PKSAN LAN secara parsial.
4. Mengindentifikasi seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi efektivitas terhadap pelaksanaan pelatihan di Puslatbang PKSAN LAN secara parsial.

5. Mengindentifikasi seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi keadilan terhadap pelaksanaan pelatihan di Puslatbang PKSAN LAN secara parsial.
6. Mengindentifikasi seberapa besar kontribusi yang diberikan dimensi kesetaraan terhadap pelaksanaan pelatihan di Puslatbang PKSAN LAN secara parsial.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca maupun penulis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan di bidang Administrasi Publik, khususnya terkait Keuangan Publik dan Pengelolaan PNBP, dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai. Peneliti juga mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik terkait keuangan publik.

2. Kegunaan Sosial

a. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pengetahuan, terutama di bidang Administrasi Publik. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan panduan bagi para peneliti di masa depan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif di bidang yang serupa.

b. Untuk Universitas

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumber kajian dan pengembangan ilmu administrasi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Temuan dan kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu administrasi dan mendorong kemajuan pengetahuan di bidang tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c. Untuk Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Puslatbang PKASN LAN Jatinangor tentang sejauh mana efektivitas *value for money* penggunaan PNBP dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I berbasis blended learning. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar evaluasi untuk meningkatkan efisiensi alokasi dana serta kualitas pelaksanaan pelatihan di masa depan.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini membahas topik mengenai Efektivitas *Value For Mone*y Dalam Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I (*Blended Learning*) Tahun 2024 Di Puslatbang PKASN LAN Jatinangor. Untuk mengukur bahwa Efektivitas *Value For Money* Dalam Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi salah satu pengaruh terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2024 Di Puslatbang PKASN LAN Jatinangor, maka harus terdapat dimensi dan/atau indikator sebagai bahan perimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan terkait efektifnya penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2024 Di Puslatbang PKASN LAN Jatinangor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.3
Kerangka Berpikir Penelitian

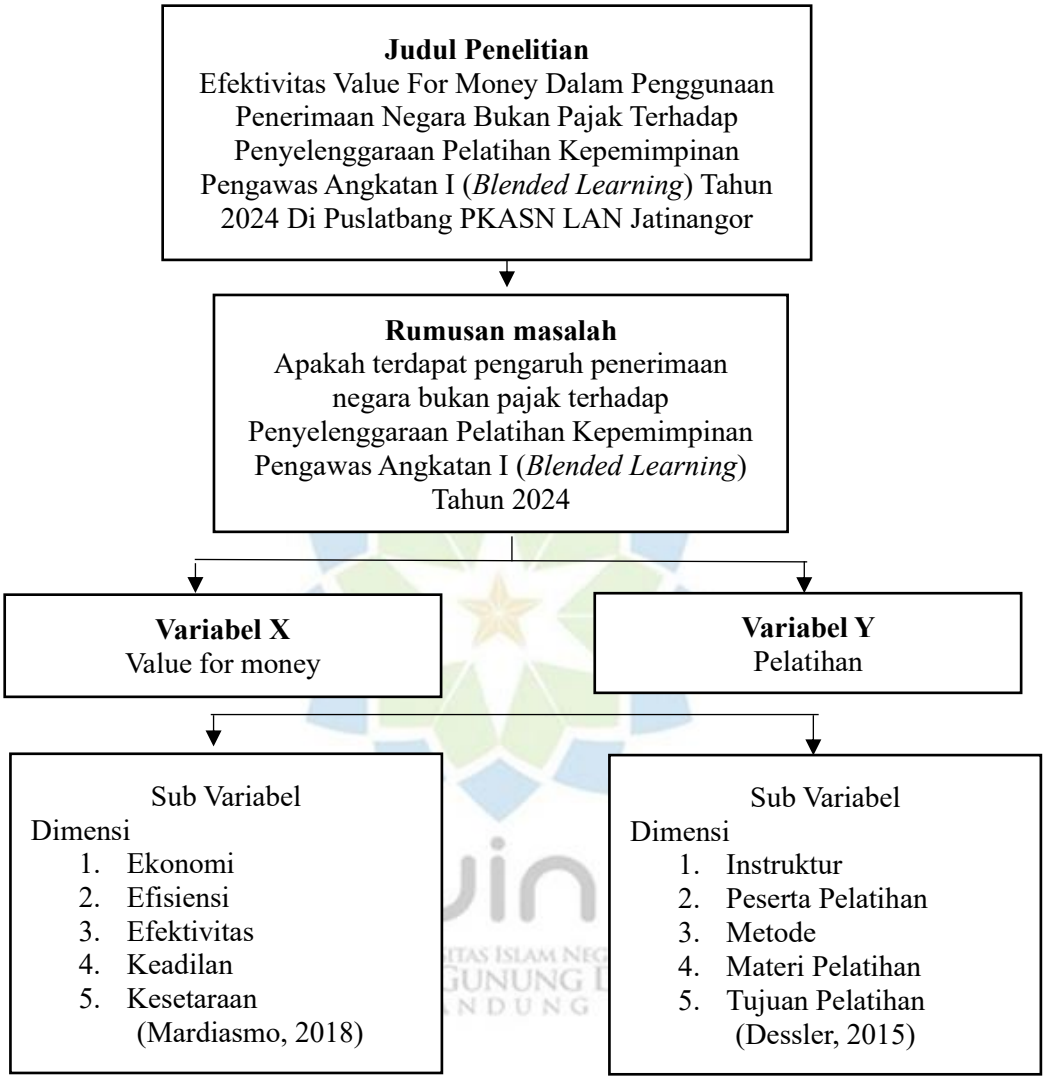

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

F. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara mengenai kondisi atau perilaku yang telah terjadi. Hipotesis berfungsi sebagai dugaan atau jawaban sementara yang didasarkan pada pernyataan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Hipotesis 1

Ha: Efektivitas *Value For Money* terhadap Pelaksanaan Pelatihan secara parsial diterima.

Ho: Efektivitas *Value For Money* terhadap Pelaksanaan Pelatihan secara parsial ditolak.

b) Hipotesis 2

Ha: Dimensi Ekonomi terhadap Pelaksanaan Pelatihan secara parsial diterima.

Ho : Dimensi Ekonomi terhadap Pelaksanaan Pelatihan secara parsial ditolak.

c) Hipotesis 3

Ha: Dimensi Efisiensi terhadap Pelaksanaan Pelatihan secara parsial diterima.

Ho : Dimensi Efisiensi terhadap Pelaksanaan Pelatihan secara parsial ditolak.

d) Hipotesis 4

Ha: Dimensi Efektivitas terhadap Pelaksanaan Pelatihan secara parsial diterima..

Ho : Dimensi Efektivitas terhadap Pelaksanaan Pelatihan secara parsial ditolak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

e) Hipotesis 5

Ha: Dimensi Keadilan terhadap Pelaksanaan Pelatihan secara parsial diterima.

Ho : Dimensi Keadilan terhadap Pelaksanaan Pelatihan secara parsial ditolak.

f) Hipotesis 6

Ha: Dimensi Kesetaraan terhadap Pelaksanaan Pelatihan secara parsial diterima.

Ho: Dimensi Kesetaraan terhadap Pelaksanaan Pelatihan secara parsial ditolak.